

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI**



Diajukan Oleh:

KHAIRUN NADZARI

NIM. 2420216310047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2026

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI**



Diajukan Oleh:

KHAIRUN NADZARI

NIM. 2420216310047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**KHAIRUN NADZARI
NIM. 2420216310047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Menyetujui Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2002

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairun Nadzari

NIM : 2420216310047

Program Studi : Magister Kenotariatan

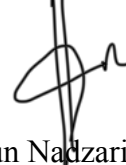
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, April 2026

Yang membuat pernyataan



Khairun Nadzari

NIM. 2420216310047

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI

Oleh :

Khairun Nadzari¹, Saprudin²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman.

RINGKASAN

Koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi memiliki karakteristik kepemilikan dan pengendalian yang berbeda dari perseroan terbatas. Dalam perkembangannya, transparansi kepemilikan dan pengendalian badan hukum menjadi isu strategis dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) mengharuskan setiap badan hukum, termasuk koperasi, untuk mengidentifikasi pihak yang secara substantif mengendalikan atau memperoleh manfaat dari badan hukum tersebut. Dalam praktiknya, proses pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan melalui akta notaris, sehingga notaris memiliki posisi penting dalam proses administrasi dan legalitas data pemilik manfaat. Permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data pemilik manfaat yang dicantumkan dalam dokumen koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum notaris atas penetapan pemilik manfaat koperasi, serta bagaimana batas kewenangannya agar tidak terjadi perluasan tanggung jawab yang melampaui fungsi jabatan. Ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan risiko kriminalisasi terhadap notaris yang bertindak dalam batas kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai konstruksi tanggung jawab hukum notaris dan batas kewenangannya dalam penetapan pemilik manfaat koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi serta menentukan batas kewenangan notaris guna menjamin kepastian hukum. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat timbul, baik administratif, perdata, maupun pidana, dalam konteks pelaksanaan kewenangan jabatan notaris. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan batas kewenangan notaris dalam verifikasi dan pencantuman data pemilik manfaat agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Kegunaan penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kenotariatan, khususnya terkait pertanggungjawaban

¹NIM. 2420216310047

²Pembimbing Tesis.

jabatan dan transparansi kepemilikan badan hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berhati-hati, serta bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang harmonis antara pengaturan *Beneficial Owner* dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum, konstruksi peraturan perundang-undangan, serta asas dan prinsip hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perkoperasian, serta regulasi mengenai Pemilik Manfaat; pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep tanggung jawab hukum, kewenangan jabatan, dan prinsip kehati-hatian; serta pendekatan sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam satu sistem hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan teori serta prinsip hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal data yang disampaikan oleh para pihak serta pelaksanaan kewajiban kehati-hatian sesuai ketentuan jabatan. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil pemilik manfaat sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, atau kelalaian yang nyata dalam proses pembuatan akta. Tanggung jawab administratif dapat timbul apabila notaris melanggar kewajiban jabatan, sedangkan tanggung jawab perdata atau pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan. Batas kewenangan notaris terletak pada fungsi pembuatan akta autentik dan verifikasi identitas secara formal, bukan sebagai pihak yang melakukan investigasi substantif terhadap struktur pengendalian koperasi. Penegasan batas tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional. Harmonisasi regulasi antara pengaturan *Beneficial Owner* dan Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan agar terdapat keseimbangan antara kepentingan transparansi badan hukum dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum.

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI

Oleh :

Khairun Nadzari³, Saprudin⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemilik Manfaat, Koperasi

Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi serta menentukan batas kewenangan notaris guna menjamin kepastian hukum. Kegunaan penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya kajian hukum kenotariatan terkait pertanggungjawaban jabatan, sedangkan secara praktis memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya secara profesional dan berhati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi pada dasarnya terbatas pada kebenaran formal data yang disampaikan oleh para pihak serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang nyata. Tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana hanya dapat timbul apabila terdapat pelanggaran kewajiban jabatan atau kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa batas kewenangan notaris terletak pada fungsi pembuatan akta autentik dan verifikasi identitas formal, bukan sebagai pihak yang melakukan investigasi substantif terhadap struktur pengendalian koperasi. Kejelasan batas kewenangan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara prinsip transparansi badan hukum dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum.

³NIM. 2420216310047

⁴Pembimbing Tesis.

THE LEGAL RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN DETERMINING THE BENEFICIAL OWNER OF COOPERATIVES

By:

Khairun Nadzari⁵, Saprudin⁶

Master of Notarial Law Program, Lambung Mangkurat University, 106

pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Responsibility, Beneficial Owner, Cooperative

This thesis entitled The Legal Responsibility of Notaries in Determining the Beneficial Owner of Cooperatives aims to analyze the legal construction of notarial responsibility in determining the beneficial owner of cooperatives and to define the limits of notarial authority in order to ensure legal certainty. Theoretically, this research contributes to the development of notarial law concerning official liability, while practically it provides guidance for notaries in exercising their authority professionally and prudently. This research employs a normative legal method with a prescriptive approach, using statutory and conceptual approaches, and qualitative analysis of primary and secondary legal materials.

The findings reveal that the legal responsibility of notaries in determining the beneficial owner of cooperatives is fundamentally limited to the formal accuracy of data submitted by the parties and the implementation of the prudential principle in accordance with the Notary Office Act. Notaries are not responsible for the material truth of beneficial ownership as long as there is no proven element of intent or negligence. Administrative, civil, or criminal liability may arise only if there is a violation of professional duties or legally proven fault.

The study further concludes that the limits of notarial authority lie in drafting authentic deeds and conducting formal identity verification, rather than carrying out substantive investigations into cooperative control structures. Clear delineation of authority is essential to ensure legal certainty and to prevent disproportionate expansion of liability, thereby maintaining a balance between transparency of legal entities and legal protection for notaries as public officials.

⁵NIM. 2420216310047

⁶Pembimbing Tesis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan limpahan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Proses penyusunan tesis ini merupakan bagian dari perjalanan intelektual yang penuh tantangan, refleksi, dan pendalaman akademik, khususnya dalam memahami dinamika hukum kenotariatan dan perkembangan regulasi mengenai transparansi kepemilikan badan hukum di Indonesia.

Perkembangan pengaturan mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan respons negara terhadap kebutuhan transparansi dan akuntabilitas badan hukum dalam rangka mencegah tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan badan hukum. Dalam konteks tersebut, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam proses pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Namun, perkembangan regulasi tersebut juga menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam memastikan kebenaran data pemilik manfaat. Tesis ini berupaya memberikan analisis normatif terhadap konstruksi tanggung jawab hukum notaris serta merumuskan batas kewenangan yang proporsional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan jabatan notaris.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, serta kebijakan kelembagaan yang kondusif bagi pengembangan penelitian dan

penyelesaian studi pada Program Studi Magister Kenotariatan. Kepemimpinan dan komitmen dalam menjaga kualitas akademik menjadi landasan penting bagi terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu.

2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang senantiasa memberikan arahan, pembinaan, dan koordinasi akademik selama masa studi. Dukungan administratif dan akademik yang diberikan sangat membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga tahap penyusunan tesis.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis dalam setiap tahapan penyusunan tesis ini. Arahan konseptual, koreksi substansial, serta kritik konstruktif yang diberikan telah memperkaya kedalaman analisis dan mempertajam argumentasi hukum dalam penelitian ini. Bimbingan tersebut tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga membentuk sikap ilmiah dan kedisiplinan intelektual penulis.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan teoretis, serta perspektif kritis selama proses perkuliahan. Diskusi-diskusi akademik yang berlangsung selama perkuliahan menjadi fondasi penting dalam membangun kerangka berpikir dan metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu kelancaran proses administrasi akademik, pelayanan akademik, serta berbagai kebutuhan teknis selama masa studi. Dukungan administratif yang tertib dan profesional sangat membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan secara tepat waktu.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan selama proses perkuliahan, diskusi ilmiah, pertukaran gagasan, serta

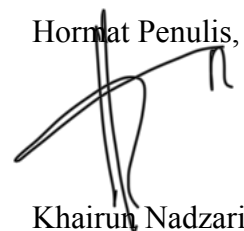
dukungan moral yang terjalin telah memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Dinamika akademik yang terbangun melalui forum-forum diskusi dan kolaborasi intelektual turut memperkaya perspektif penulis dalam memahami berbagai persoalan hukum kenotariatan, termasuk dalam penyusunan tesis ini. Kebersamaan tersebut menjadi kenangan berharga sekaligus bagian dari proses pembentukan integritas dan profesionalitas sebagai calon notaris.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi tanpa henti. Dukungan tersebut menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Harapan penulis, tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan serta menjadi referensi dalam memahami tanggung jawab hukum notaris dalam penetapan pemilik manfaat koperasi.

Akhirnya, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik kenotariatan di Indonesia.

Hormat Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned between the text 'Hormat Penulis,' and 'Khairun Nadzari'.

Khairun Nadzari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI....	 30
A. Kedudukan dan Peran Notaris dalam Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi.....	30
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi.....	46
C. Batas Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi.....	60
 BAB III BATAS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KOPERASI UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI NOTARIS	 71
A. Ruang Lingkup Kewenangan Notaris dalam Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi.....	71

B. Implikasi Batas Kewenangan Notaris terhadap Kepastian Hukum.....	84
C. Konstruksi Batas Kewenangan Notaris yang Ideal dalam Penetapan Pemilik Manfaat Koperasi.....	94
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA